



Judul : Wapres: revisi jangan cederai reformasi
Tanggal : Sabtu, 13 Mei 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

UNDANG-UNDANG TNI

Wapres: Revisi Jangan Cederai Reformasi

JAKARTA, KOMPAS — Usulan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia boleh-boleh saja dilakukan. Namun, selain perlu dibahas lagi, revisi UU TNI jangan sampai mencederai reformasi.

Menanggapi pertanyaan pers terkait usulan prajurit TNI memegang lebih banyak jabatan sipil dalam usulan revisi UU TNI, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar hal itu dibahas lebih lanjut. "Soal adanya usulan perwira aktif bisa (lebih banyak menduduki jabatan sipil) coba dibicarakan. Yang penting tentunya jangan mencederai semangat reformasi," ucap Wapres, Jumat (12/5/2023), di Kota Ternate, Maluku Utara.

Menurut Wapres, salah satu semangat reformasi yang dimaksud adalah penghapusan Dwifungsi ABRI. "Dulu itu, kan, menghilangkan dwifungsi, semangat itu yang jangan dicerai," tuturnya.

Wapres mengatakan, selama tak menjerus pada kembalinya Dwifungsi ABRI, usulan revisi UU TNI dapat dibahas lebih lanjut. "Asalkan itu bisa, artinya bisa tidak kembali ke arah (Dwifungsi ABRI) itu, saya kira silakan dibicarakan," ucapnya.

Sebelumnya, dalam pembahasan internal, TNI mendorong supaya prajurit aktif bisa memegang lebih banyak jabatan sipil. Pasal 47 Ayat 2 UU TNI menyebutkan, prajurit TNI bisa menduduki jabatan sipil di sepuluh kementerian dan lembaga. Namun, dalam usulan revisi UU TNI, prajurit aktif TNI bisa duduk di 18 kementerian dan lembaga, ditambah dengan kementerian lain jika memang dibutuhkan.

Dulu itu, kan, menghilangkan dwifungsi, semangat itu yang jangan dicerai.

Ma'ruf Amin

Direktur Eksekutif Centra Initiative Al Araf mengatakan, perluasan fungsi TNI tidak hanya sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga keamanan negara, itu sangat keliru. Sebab, di negara demokrasi, militer adalah alat pertahanan negara yang disiapkan, dididik, dan dilatih untuk perang.

Pengamat militer UPN Veteran Jakarta, Jerry Indrawan, menilai pengisian jabatan sipil oleh prajurit aktif dimungkinkan. Sebab, dalam teori sekuritisasi, presiden atau pemimpin negara bisa memetakan potensi ancaman sesuai pada periode masanya.

Sudah berjalan baik

Sehari sebelumnya, saat ditanya pers sesuai pertemuannya dengan Menteri Pertahanan dan Urusan Veteran Republik Demokratik Kongo, di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menilai bahwa UU TNI yang saat ini berlaku sebenarnya sudah berjalan dengan cukup baik. Karena itu, ia mempertanyakan jika undang-undang tersebut harus direvisi. "UU TNI yang sudah berjalan lama saya kira sudah berjalan dengan baik," katanya.

Bahkan, menurut Prabowo, UU TNI tersebut telah meng-

atur di antaranya cara pencegahan korupsi di lingkungan TNI. "Kami mencegah keborosan serta korupsi. Ini sangat tegas, Presiden (Joko Widodo) menghendaki pengawasan yang sangat baik dan sangat kuat," ujarnya.

Namun, saat ditanya soal perubahan posisi dan pengajuan anggaran TNI yang bisa secara langsung diajukan ke Kementerian Keuangan tanpa melalui Kementerian Pertahanan, Prabowo tak menjawab dan justru beranjak meninggalkan jurnalis.

Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Widjojono, saat dihubungi mengatakan, usulan revisi UU TNI baru dibahas pada level Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI dan pembahasan undang-undang tersebut belum dibahas lebih lanjut oleh Panglima TNI.

Terkait pengajuan anggaran, Julius mengatakan, TNI tetap berkoordinasi dengan Kemenhan, tetapi anggaran dari TNI diajukan langsung ke Kemenkeu. Tujuannya agar proses pengadaan barang dan jasa bisa lebih efektif dan efisien. Jalur birokrasi pun diakui akan lebih singkat dan pengadaan akan lebih mudah dikontrol (Kompas.id, 11 Mei 2023).

Anggota Komisi I DPR, Tugbagus Hasanuddin, mengatakan, TNI dan Kemenhan harus berkoordinasi dan menyinkronkan dalam hal anggaran kebutuhan TNI dan kegiatan pertahanan. "Kegiatan TNI dasarnya dari Kemenhan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak pas. Setelah di-filter, cocok atau tidaknya tugas pertahanan di Kemenhan baru diajukan ke Kemenkeu," ujarnya. (INA/Z02)